Al Iidara Balad
Jurnal Administrasi Negara
ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DI DESA PADANG BASAR HILIR KECAMATAN AMUNTAI UTARA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Djayeng Turano Gunade[1], Helsa Madina[2]
Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai
Email : hrsfdillah123@gmail.com

ABSTRAK

Pengelolaan sampah rumah tangga merupakan isu penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena berkaitan dengan kualitas lingkungan, kesehatan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan. Keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada kapasitas pemerintah, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Desa Padang Basar Hilir, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambatnya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik *purposive sampling*. Informan meliputi aparat desa, Badan Permusyawaratan Desa, ketua RT, petugas kebersihan, dan masyarakat. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah masih cukup efektif. Kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi masih terbatas akibat minimnya sarana dan sosialisasi. Dari aspek kemauan, kepedulian masyarakat mulai meningkat meskipun masih terdapat kebiasaan membuang dan membakar sampah sembarangan. Dari aspek kemampuan, pengetahuan mengenai pemilahan dan pengolahan sampah masih rendah. Faktor pendukung yaitu kemauan masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui keterlibatan warga, sedangkan faktor penghambat meliputi kurangnya dana, tidak adanya sanksi yang tegas, dan kurangnya sosialisasi.

Kata Kunci: partisipasi masyarakat, pengelolaan sampah, pelayanan publik, pemerintah desa, administrasi publik.

ABSTRACT

Household waste management is a critical issue in local governance because it is closely associated with environmental quality, public health, and sustainable development. The effectiveness of household waste management depends not only on the capacity of local government but also on the active participation of the community. This study aims to analyze community participation in household waste management in Padang Basar Hilir Village, Amuntai Utara District, Hulu Sungai Utara Regency, and to identify the factors that facilitate and hinder such participation. A descriptive qualitative approach was employed using purposive sampling to select the research informants. The informants consisted of village officials, members of the Village Consultative Body, neighborhood association (RT) leaders, sanitation workers, and community members. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation, and were analyzed using the interactive model developed by Miles, Huberman, and Saldaña. The findings indicate that community participation in household waste management is moderately effective. Opportunities for community involvement remain limited due to inadequate facilities and insufficient public outreach. In terms of willingness, public awareness and concern for waste management have gradually improved; however, improper waste disposal and open burning remain common practices. Regarding capability, community knowledge of waste segregation and processing is still limited. The primary supporting factor is the community's willingness to engage in waste management through active participation, while the major inhibiting factors including a lack of funding, the absence of strict sanctions, and a lack of socialization.

Keywords*: community participation; household waste management; public service; village government; public administration.*

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

PENDAHULUAN

Pengelolaan sampah rumah tangga menjadi salah satu isu strategis dalam penyelenggaraan administrasi publik karena berhubungan langsung dengan kualitas pelayanan publik, kesehatan masyarakat, keberlanjutan lingkungan, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Peningkatan jumlah penduduk, perubahan pola konsumsi, berkembangnya aktivitas ekonomi, dan proses urbanisasi telah menyebabkan volume timbulan sampah terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk mengembangkan sistem pengelolaan sampah yang tidak hanya efektif dari sisi operasional, tetapi juga mampu menciptakan tata kelola yang berorientasi pada keberlanjutan melalui keterlibatan aktif masyarakat sebagai salah satu aktor utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik (Gunawan *et al.*, 2017).

Perkembangan paradigma administrasi publik turut mengubah cara pandang terhadap pengelolaan sampah. Aktivitas tersebut tidak lagi diposisikan semata-mata sebagai urusan teknis kebersihan, melainkan sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang menekankan kolaborasi antaraktor. Perspektif *New Public Governance* memandang bahwa penyelesaian persoalan publik yang kompleks memerlukan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam hubungan yang partisipatif, kolaboratif, serta akuntabel. Oleh sebab itu, efektivitas pengelolaan sampah sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam membangun ruang partisipasi yang memungkinkan masyarakat terlibat sejak tahap pengurangan, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, hingga pemanfaatan kembali sampah. Dengan demikian, keberhasilan kebijakan persampahan tidak hanya diukur dari kualitas layanan pemerintah, tetapi juga dari tingkat keterlibatan warga dalam keseluruhan proses pengelolaan (Abidin, 2023).

Komitmen pemerintah Indonesia terhadap pengelolaan sampah yang berkelanjutan diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang mengamanatkan penyelenggaraan pengelolaan sampah secara sistematis, terpadu, dan berkesinambungan dengan menerapkan prinsip *reduce, reuse, dan recycle* (3R). Kebijakan nasional tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui berbagai regulasi daerah yang mengatur pembagian tanggung jawab pemerintah dan masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan. Di Kabupaten Hulu Sungai Utara, arah kebijakan tersebut diimplementasikan melalui Perda Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah yang menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dalam pengelolaan sampah sejak dari sumbernya. Kehadiran regulasi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan lingkungan tidak hanya bergantung pada kapasitas pemerintah sebagai penyedia layanan, tetapi juga pada kesediaan masyarakat untuk berperan aktif dalam pelaksanaannya.

Walaupun kerangka kebijakan telah tersedia, implementasi pengelolaan sampah pada tingkat desa masih menghadapi berbagai tantangan. Berbagai kajian menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran masyarakat, terbatasnya sarana dan prasarana, lemahnya koordinasi antarpemangku kepentingan, serta kurang optimalnya edukasi mengenai pengelolaan lingkungan menjadi faktor yang menghambat efektivitas pengelolaan sampah. Dampak dari kondisi tersebut terlihat pada masih tingginya praktik pembuangan sampah secara sembarangan, pembakaran sampah rumah tangga, hingga meningkatnya risiko pencemaran lingkungan yang berimplikasi terhadap kesehatan masyarakat dan kualitas ekosistem (Rahmawati, 2021). Situasi tersebut mengindikasikan bahwa keberadaan regulasi belum sepenuhnya mampu menghasilkan perubahan perilaku apabila tidak disertai dukungan kelembagaan, pelayanan publik yang memadai, dan peningkatan kapasitas masyarakat.

Permasalahan serupa juga dijumpai di Desa Padang Basar Hilir, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Hasil observasi awal memperlihatkan bahwa pengelolaan sampah

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

rumah tangga masih menghadapi sejumlah kendala mendasar. Pemilahan sampah sejak dari sumber belum menjadi praktik yang lazim sehingga sebagian besar limbah rumah tangga masih dibuang dalam kondisi tercampur. Selain itu, perilaku membakar sampah maupun membuang sampah ke sungai masih ditemukan pada sebagian warga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan prinsip 3R belum menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat dalam mengelola sampah rumah tangga.

Persoalan lain yang turut memengaruhi kondisi tersebut adalah belum optimalnya pelaksanaan sosialisasi, pendampingan, dan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah desa maupun instansi terkait. Terbatasnya kegiatan edukasi menyebabkan pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan sampah berbasis 3R masih relatif rendah. Di sisi lain, fasilitas pendukung seperti tempat sampah, sarana pemilahan, serta Tempat Penampungan Sementara (TPS) belum tersedia secara memadai. Pelayanan pengangkutan sampah juga belum berlangsung secara terjadwal sehingga penumpukan sampah masih sering terjadi di kawasan permukiman. Keterbatasan infrastruktur tersebut mempersempit peluang masyarakat untuk menerapkan praktik pengelolaan sampah yang sesuai dengan ketentuan kebijakan lingkungan.

Fenomena tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara kondisi normatif yang diatur dalam regulasi dengan praktik empiris di lapangan. Secara normatif, masyarakat memiliki kewajiban untuk mengurangi, memilah, memanfaatkan kembali, serta mengelola sampah secara bertanggung jawab. Namun, realitas menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat belum berkembang menjadi budaya kolektif yang kuat. Situasi ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, meliputi kapasitas kelembagaan pemerintah desa, kualitas pelayanan publik, perilaku masyarakat, kondisi sosial, serta efektivitas komunikasi antara pemerintah dan warga. Dengan kata lain, keberadaan regulasi saja belum cukup untuk menghasilkan perubahan apabila tidak diikuti oleh penguatan aspek kelembagaan dan partisipasi masyarakat.

Dalam perspektif administrasi publik, rendahnya keterlibatan masyarakat mencerminkan bahwa praktik collaborative governance belum berjalan secara optimal. Pemerintah desa tidak hanya menjalankan fungsi administratif sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga memiliki tanggung jawab sebagai fasilitator yang mampu membangun komunikasi, menyediakan pelayanan yang memadai, memperluas ruang partisipasi, serta meningkatkan kapasitas masyarakat melalui edukasi dan pembinaan yang berkelanjutan. Oleh sebab itu, keberhasilan pengelolaan sampah tidak cukup dinilai dari volume sampah yang berhasil diangkut, tetapi juga dari kemampuan pemerintah membangun perilaku kolektif yang mendorong masyarakat mengelola sampah secara mandiri, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah dipengaruhi oleh kombinasi faktor sosial, kelembagaan, ekonomi, maupun teknis. Tingkat kesadaran masyarakat, efektivitas kepemimpinan pemerintah lokal, intensitas sosialisasi, ketersediaan sarana pendukung, serta keberadaan kelembagaan masyarakat seperti bank sampah merupakan beberapa faktor yang terbukti berkontribusi terhadap keberhasilan pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Namun demikian, sebagian besar penelitian lebih banyak dilakukan pada wilayah perkotaan atau berfokus pada evaluasi program tertentu sehingga belum banyak memberikan gambaran mengenai dinamika partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga pada wilayah perdesaan. Kesenjangan tersebut menunjukkan masih terbukanya ruang pengembangan kajian yang mengkaji keterlibatan masyarakat secara lebih mendalam dengan menggunakan perspektif teori partisipasi masyarakat (Rahmadani and others, 2021; Anju, Hariyoko and Soesiantoro, 2023).

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

Penelitian ini disusun untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Desa Padang Basar Hilir melalui kerangka teori partisipasi yang dikemukakan oleh Slamet, yaitu kesempatan, kemauan, dan kemampuan. Ketiga dimensi tersebut dipandang mampu memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keterlibatan masyarakat, baik dari sisi dukungan pemerintah dalam menyediakan ruang partisipasi maupun dari aspek kesiapan masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam pengelolaan sampah. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang lebih utuh mengenai hubungan antara kapasitas kelembagaan pemerintah desa dan perilaku masyarakat dalam implementasi kebijakan lingkungan.

Selain memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian administrasi publik, penelitian ini juga memiliki nilai praktis bagi pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam merumuskan strategi peningkatan partisipasi masyarakat. Temuan penelitian diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih adaptif melalui penguatan edukasi lingkungan, penyediaan infrastruktur persampahan yang memadai, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pengembangan mekanisme kolaborasi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, pengelolaan sampah tidak hanya berorientasi pada penyelesaian persoalan teknis, tetapi juga diarahkan untuk membangun budaya masyarakat yang peduli terhadap lingkungan secara berkelanjutan.Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Desa Padang Basar Hilir, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan dimensi kesempatan, kemauan, dan kemampuan, serta mengidentifikasi berbagai faktor yang mendukung maupun menghambat keterlibatan masyarakat dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola persampahan berbasis partisipasi masyarakat sekaligus memperkaya pengembangan teori administrasi publik, khususnya pada bidang implementasi kebijakan dan tata kelola lingkungan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Desa Padang Basar Hilir. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengungkap fenomena sosial berdasarkan pengalaman, persepsi, dan interaksi para aktor yang terlibat, serta menggambarkan kondisi empiris tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel penelitian (Sugiyono, 2020).

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, meliputi Kepala Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Ketua RT, petugas kebersihan, dan masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan sampah. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen, seperti peraturan perundang-undangan, arsip pemerintah desa, laporan pengelolaan sampah, serta literatur yang relevan dengan penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Peneliti berperan sebagai instrumen utama (*human instrument*) dengan didukung pedoman observasi, pedoman wawancara, alat perekam, kamera dokumentasi, dan catatan lapangan. Wawancara disusun berdasarkan indikator partisipasi masyarakat yang meliputi kesempatan, kemauan, dan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (Hardani and others,

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

2020). Keabsahan data dijamin melalui teknik triangulasi sumber, teknik, dan waktu dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga temuan penelitian memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi dan sesuai dengan kondisi empiris di lapangan (Sugiyono, 2020).

PEMBAHASAN

Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Desa Padang Basar Hilir Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara

Penelitian ini mengkaji partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga dengan menggunakan teori partisipasi masyarakat yang dikemukakan oleh Slamet, yang mencakup tiga dimensi utama, yaitu kesempatan *(opportunity*), kemauan (*willingness*), dan kemampuan (*ability*). Ketiga dimensi tersebut dipandang sebagai unsur fundamental dalam mewujudkan partisipasi masyarakat yang efektif pada penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

Kesempatan Masyarakat untuk Berpartisipasi

Kesempatan merupakan dimensi yang menunjukkan sejauh mana pemerintah menyediakan ruang, fasilitas, dan mekanisme yang memungkinkan masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Dalam perspektif Administrasi Publik, kesempatan mencerminkan komitmen pemerintah dalam menciptakan enabling environment, yaitu kondisi yang mendukung masyarakat untuk berpartisipasi melalui penyediaan pelayanan publik, regulasi, serta berbagai sarana pendukung yang memadai. Dengan tersedianya kesempatan yang memadai, masyarakat akan memiliki akses yang lebih luas untuk berperan aktif dalam pengelolaan sampah.

Berdasarkan hasil penelitian, kesempatan yang dimiliki masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sampah di Desa Padang Basar Hilir masih tergolong belum memadai. Kondisi tersebut terlihat dari keterbatasan fasilitas yang tersedia untuk mendukung aktivitas pengelolaan sampah. Pemerintah desa memang telah menyediakan beberapa tempat sampah sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat, namun jumlah fasilitas tersebut masih sangat terbatas sehingga satu unit tempat sampah harus digunakan secara bersama oleh beberapa kepala keluarga. Selain itu, desa juga belum memiliki fasilitas pemilahan sampah maupun Tempat Penampungan Sementara (TPS). Akibatnya, seluruh sampah yang dihasilkan masyarakat langsung diangkut menuju tempat pemrosesan akhir tanpa melalui proses pemisahan sesuai karakteristiknya. Keadaan tersebut menyebabkan masyarakat belum memiliki kesempatan yang memadai untuk menerapkan pengelolaan sampah berdasarkan prinsip *Reduce, Reuse, dan Recycle* (3R) sejak dari sumbernya.

Keterbatasan kesempatan masyarakat tidak hanya terlihat dari aspek penyediaan sarana dan prasarana, tetapi juga tercermin pada sistem pelayanan persampahan yang belum berjalan secara optimal. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian, pengangkutan sampah belum memiliki jadwal yang tetap dan dilakukan secara tidak rutin. Dalam praktiknya, pengangkutan sampah umumnya dilaksanakan setiap dua hingga tiga minggu sekali, bahkan pada kondisi tertentu dapat berlangsung lebih lama bergantung pada ketersediaan petugas maupun situasi di lapangan. Ketidakteraturan layanan tersebut menyebabkan sampah sering menumpuk di lingkungan permukiman, sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap serta berpotensi menurunkan semangat masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa dimensi kesempatan sebagaimana dikemukakan oleh Slamet memiliki peranan yang sangat penting dalam mendorong tumbuhnya partisipasi masyarakat. Kesempatan merupakan faktor eksternal yang menentukan sejauh mana masyarakat

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

mampu terlibat dalam suatu program. Masyarakat akan lebih terdorong untuk berpartisipasi apabila pemerintah menyediakan fasilitas yang memadai, sistem pelayanan yang jelas, serta kemudahan akses terhadap berbagai layanan pengelolaan sampah. Sebaliknya, apabila fasilitas yang tersedia masih terbatas dan pelayanan belum berjalan secara optimal, maka peluang masyarakat untuk menerapkan perilaku pengelolaan sampah yang sesuai dengan ketentuan juga akan semakin berkurang karena tidak didukung oleh lingkungan yang kondusif.

Hasil penelitian ini juga memperkuat paradigma New Public Service yang menempatkan pemerintah sebagai fasilitator dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam paradigma tersebut, tanggung jawab pemerintah tidak hanya sebatas menyediakan layanan pengangkutan sampah, tetapi juga menciptakan berbagai kondisi yang memungkinkan masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan. Oleh karena itu, peningkatan kesempatan masyarakat perlu diwujudkan melalui penyediaan sarana dan prasarana yang lebih memadai, pembangunan Tempat Penampungan Sementara (TPS), penyediaan tempat sampah terpilah sesuai jenis sampah, serta penyusunan jadwal pengangkutan sampah yang dilaksanakan secara rutin dan memiliki kepastian waktu. Berbagai upaya tersebut merupakan prasyarat penting untuk memperluas ruang partisipasi masyarakat sekaligus meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah rumah tangga di Desa Padang Basar Hilir.

Kemauan Masyarakat untuk Berpartisipasi

Kemauan merupakan dimensi yang menggambarkan kesediaan masyarakat untuk terlibat secara sukarela dalam pengelolaan sampah rumah tangga sebagai wujud tanggung jawab terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Dalam penelitian ini, dimensi kemauan dianalisis melalui perilaku masyarakat dalam membuang sampah pada tempat yang telah disediakan, kesediaan melakukan pemilahan sampah sejak dari rumah tangga, serta kepedulian terhadap upaya menjaga kebersihan lingkungan. Tingkat kemauan masyarakat menjadi salah satu indikator penting karena keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada tersedianya fasilitas, tetapi juga ditentukan oleh kesadaran dan komitmen masyarakat dalam menerapkan perilaku yang mendukung pengelolaan sampah secara berkelanjutan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemauan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sampah di Desa Padang Basar Hilir masih berada pada kategori cukup baik. Sebagian masyarakat telah memperlihatkan kepedulian dengan membuang sampah pada tempat yang tersedia. Namun demikian, masih ditemukan perilaku membuang sampah ke sungai, terutama untuk jenis sampah tertentu, seperti popok bayi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perilaku pengelolaan sampah yang sesuai dengan ketentuan belum sepenuhnya menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Selain dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran sebagian masyarakat, kondisi ini juga berkaitan dengan terbatasnya jumlah tempat sampah yang tersedia sehingga belum seluruh rumah tangga memiliki akses terhadap fasilitas pembuangan sampah yang memadai.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa kemauan masyarakat dalam melakukan pemilahan sampah masih relatif rendah. Sebagian besar rumah tangga masih mencampurkan sampah organik dan anorganik ke dalam satu wadah sebelum dibuang. Kebiasaan tersebut menyebabkan proses pemanfaatan kembali maupun daur ulang menjadi sulit dilakukan karena seluruh jenis sampah telah bercampur sejak dari sumbernya. Rendahnya praktik pemilahan sampah tidak hanya dipengaruhi oleh kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah berbasis prinsip Reduce, Reuse, dan Recycle (3R), tetapi juga disebabkan oleh belum tersedianya fasilitas pendukung berupa tempat sampah yang dipisahkan berdasarkan jenisnya.

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

Dengan demikian, masyarakat belum memiliki kebiasaan maupun dorongan yang kuat untuk menerapkan pengelolaan sampah sesuai prinsip 3R.

Dalam perspektif Administrasi Publik, kemauan masyarakat untuk berpartisipasi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individual, tetapi juga berkaitan erat dengan kualitas pelayanan publik serta efektivitas komunikasi yang dibangun oleh pemerintah. Kesediaan masyarakat untuk terlibat akan berkembang apabila pemerintah mampu menciptakan hubungan yang baik melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan, edukasi, maupun pembinaan yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Sebaliknya, apabila interaksi antara pemerintah desa dan masyarakat masih terbatas, maka perilaku lama dalam pengelolaan sampah cenderung terus dipertahankan karena masyarakat belum memperoleh pemahaman yang memadai mengenai pentingnya perubahan perilaku dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori partisipasi masyarakat yang dikemukakan oleh Slamet, yang menempatkan kemauan sebagai salah satu prasyarat utama terbentuknya partisipasi masyarakat. Tingginya kesempatan yang diberikan pemerintah tidak akan menghasilkan partisipasi yang optimal apabila masyarakat belum memiliki kesadaran dan keinginan untuk terlibat. Sebaliknya, kemauan yang kuat akan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif meskipun masih terdapat berbagai keterbatasan. Oleh karena itu, pembentukan kemauan masyarakat perlu dilakukan secara berkesinambungan melalui pendekatan yang mampu meningkatkan kesadaran kolektif mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sebagai tanggung jawab bersama.

Temuan penelitian ini juga mengindikasikan bahwa peningkatan kemauan masyarakat tidak dapat dicapai hanya melalui penyediaan sarana dan prasarana. Upaya tersebut perlu didukung oleh strategi perubahan perilaku (*behavioural change*) yang dilaksanakan secara sistematis melalui edukasi lingkungan, kampanye kebersihan, penyuluhan mengenai pengelolaan sampah rumah tangga, serta penguatan kembali nilai-nilai gotong royong yang telah berkembang di tengah masyarakat. Dengan adanya kombinasi antara penyediaan fasilitas dan pembinaan yang berkelanjutan, diharapkan kesadaran masyarakat akan terus meningkat sehingga pengelolaan sampah tidak lagi dipandang sebagai tanggung jawab pemerintah semata, melainkan menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Dengan demikian, kemauan masyarakat menjadi fondasi yang sangat menentukan dalam mewujudkan sistem pengelolaan sampah rumah tangga yang efektif, partisipatif, dan berkelanjutan.

Kemampuan Masyarakat untuk Berpartisipasi

Kemampuan merupakan dimensi yang menggambarkan kapasitas masyarakat dalam memahami sekaligus menerapkan pengelolaan sampah rumah tangga sesuai dengan prinsip-prinsip yang benar. Dalam konteks penelitian ini, kemampuan tidak hanya diartikan sebagai penguasaan pengetahuan mengenai konsep Reduce, Reuse, dan Recycle (3R), tetapi juga mencakup keterampilan masyarakat dalam melakukan pemilahan sampah, memanfaatkan kembali barang yang masih memiliki nilai guna, mendaur ulang limbah rumah tangga, serta mengolah sampah menjadi produk yang bernilai ekonomi maupun bermanfaat bagi lingkungan. Oleh karena itu, kemampuan menjadi salah satu unsur penting yang menentukan kualitas partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian, kemampuan masyarakat Desa Padang Basar Hilir dalam pengelolaan sampah rumah tangga masih tergolong rendah. Sebagian besar informan mengungkapkan bahwa masyarakat belum memahami secara menyeluruh konsep 3R sebagai dasar pengelolaan sampah modern. Pengetahuan mengenai upaya mengurangi penggunaan bahan yang

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

berpotensi menjadi sampah (*reduce*), memanfaatkan kembali barang yang masih layak digunakan (*reuse*), maupun mendaur ulang sampah agar memiliki nilai guna baru (*recycle*) masih terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan sampah belum berkembang secara optimal sehingga praktik pengelolaan sampah yang dilakukan masih didominasi oleh kebiasaan membuang sampah tanpa melalui proses pengelolaan terlebih dahulu.

Rendahnya kemampuan masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Salah satu penyebab utamanya adalah belum optimalnya kegiatan sosialisasi dan edukasi yang diselenggarakan oleh pemerintah desa maupun instansi terkait. Selain itu, akses masyarakat terhadap informasi mengenai teknik pengelolaan sampah yang benar masih terbatas, sementara kegiatan pelatihan yang bertujuan meningkatkan keterampilan masyarakat dalam mengelola sampah juga belum dilaksanakan secara berkesinambungan. Akibatnya, masyarakat belum memperoleh pengetahuan maupun pengalaman praktis yang memadai untuk menerapkan pengelolaan sampah sesuai dengan prinsip 3R.

Selain aspek pengetahuan, keterampilan masyarakat dalam mengolah sampah juga masih belum berkembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai limbah yang harus segera dibuang, bukan sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan kembali. Sampah rumah tangga umumnya langsung dibuang tanpa melalui proses pemilahan, pengomposan, ataupun daur ulang menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa masyarakat belum memiliki kapasitas teknis yang memadai untuk mengelola sampah secara produktif, sehingga potensi pemanfaatan sampah sebagai sumber nilai tambah belum dapat diwujudkan secara optimal.

Dalam perspektif teori partisipasi masyarakat yang dikemukakan oleh Slamet, kemampuan merupakan faktor yang sangat menentukan kualitas keterlibatan masyarakat dalam suatu program pembangunan. Masyarakat yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang memadai akan lebih mudah berpartisipasi secara aktif dibandingkan masyarakat yang belum memiliki kapasitas tersebut. Oleh karena itu, peningkatan kemampuan masyarakat menjadi salah satu prasyarat penting dalam memperkuat partisipasi masyarakat pada pengelolaan sampah rumah tangga.

Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa peningkatan kemampuan masyarakat tidak dapat dilakukan secara instan, melainkan memerlukan proses pembelajaran yang berkelanjutan. Pemerintah desa memiliki peran strategis dalam memfasilitasi peningkatan kapasitas masyarakat melalui penyelenggaraan sosialisasi, pelatihan teknis, pendampingan, pembentukan kader lingkungan, serta pengembangan program pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Melalui berbagai kegiatan tersebut, masyarakat diharapkan tidak hanya memahami konsep pengelolaan sampah secara teoritis, tetapi juga mampu mengimplementasikan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari melalui praktik pemilahan, pemanfaatan kembali, daur ulang, maupun pengolahan sampah organik menjadi kompos.

Apabila ditinjau dari perspektif *Collaborative Governance*, peningkatan kemampuan masyarakat merupakan bentuk investasi sosial yang berperan dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Tata kelola kolaboratif hanya dapat berjalan secara efektif apabila seluruh pihak yang terlibat memiliki kapasitas yang memadai untuk menjalankan peran dan tanggung jawabnya. Semakin tinggi tingkat pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam mengelola sampah, semakin besar pula peluang terciptanya pola kerja sama yang efektif antara pemerintah desa dan masyarakat dalam mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang mandiri, partisipatif, serta berkelanjutan. Dengan demikian, penguatan kapasitas masyarakat tidak hanya

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

berdampak pada peningkatan kualitas partisipasi, tetapi juga menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di tingkat desa.

Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga

Selain dianalisis berdasarkan dimensi kesempatan, kemauan, dan kemampuan, tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Desa Padang Basar Hilir juga dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung dan penghambat. Kedua kelompok faktor tersebut saling berinteraksi dalam menentukan efektivitas pelaksanaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendukung utama berasal dari mulai tumbuhnya kesadaran sebagian masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Kesadaran tersebut mendorong keterlibatan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang sehat sekaligus menjadi modal sosial untuk meningkatkan partisipasi. Selain itu, komitmen pemerintah desa dalam menyediakan pelayanan persampahan, seperti penyediaan tempat sampah, pengangkatan petugas kebersihan, dan pelayanan pengangkutan sampah, menunjukkan adanya dukungan kelembagaan terhadap pengelolaan sampah meskipun masih terbatas. Faktor pendukung lainnya adalah masih kuatnya budaya gotong royong yang menjadi potensi dalam membangun pengelolaan sampah secara kolektif apabila didukung oleh pembinaan dan koordinasi yang berkelanjutan.

Di sisi lain, penelitian ini mengidentifikasi beberapa faktor yang menghambat partisipasi masyarakat. Hambatan utama berupa keterbatasan sarana dan prasarana, terutama belum tersedianya Tempat Penampungan Sementara (TPS), tempat sampah terpilah, serta jumlah fasilitas persampahan yang belum memadai. Kondisi tersebut diperparah oleh pelayanan pengangkutan sampah yang belum dilakukan secara rutin sehingga sering terjadi penumpukan sampah di lingkungan permukiman. Selain itu, kegiatan sosialisasi dan edukasi mengenai pengelolaan sampah berbasis prinsip *Reduce, Reuse, dan Recycle* (3R) belum dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam mengelola sampah masih terbatas. Rendahnya kesadaran sebagian masyarakat yang masih menganggap pengelolaan sampah sebagai tanggung jawab pemerintah juga menyebabkan praktik membuang maupun membakar sampah masih ditemukan.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Desa Padang Basar Hilir, Kec. Amuntai Utara, Kab. Hulu Sungai Utara belum berlangsung secara optimal. Berdasarkan dimensi partisipasi menurut Slamet, aspek kesempatan, kemauan, dan kemampuan belum terpenuhi secara seimbang. Kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi masih dibatasi oleh keterbatasan sarana dan prasarana persampahan serta belum optimalnya sosialisasi dan pembinaan. Dari aspek kemauan, mulai tumbuh kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, namun masih terdapat perilaku membuang dan membakar sampah secara tidak tepat. Sementara itu, pada aspek kemampuan, pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam menerapkan pengelolaan sampah berbasis prinsip *Reduce, Reuse, dan Recycle* (3R) masih relatif rendah.

Partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung yaitu kemauan masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui keterlibatan warga. Sebaliknya, keterbatasan fasilitas persampahan, belum optimalnya pelayanan pengangkutan

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

sampah, rendahnya intensitas sosialisasi dan edukasi, serta masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat menjadi hambatan utama dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang partisipatif.

Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan partisipasi masyarakat tidak hanya bergantung pada komitmen pemerintah desa, tetapi juga memerlukan penguatan kapasitas masyarakat melalui edukasi yang berkelanjutan, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, peningkatan kualitas pelayanan persampahan, serta penguatan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Upaya tersebut diharapkan mampu menciptakan sistem pengelolaan sampah rumah tangga yang lebih efektif, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, D. (2023) *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan*. Purbalingga: Eureka Media Aksara.

Anju, F.T., Hariyoko, Y. and Soesiantoro, A. (2023) 'Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Sedati Sidoarjo (Studi Pelaksanaan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2019 tentang Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga)', *Jurnal Ilmiah*, 3(2), pp. 27–43.

Gunawan, H. *et al.* (2017) *Pendidikan Lingkungan Hidup Berbasis Taman Keanekaragaman Hayati: Sebuah Panduan untuk Guru dan Siswa Sekolah Dasar*. Subang: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang.

Hardani and others (2020) *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu.

Rahmadani, H.M.I. and others (2021) 'Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2012', *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan*, pp. 72–80.

Rahmawati, F. (2021) *Pengolahan Sampah 6M Berbasis Project Based Learning (PjBL)*.

Sugiyono (2020) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.